

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan umum yang mengedepankan demokrasi sebagai sebuah pilihan demi sebuah bentuk kemajuan dalam melibatkan masyarakat pada aktifitas yang akan melibatkan mereka ke masa depan. Keberadaan sistem tersebut adalah konsekuensi dari kemajuan sebuah bangsa dan menunjukkan semakin dinamisnya kehidupan masyarakat pada bangsa tersebut. Berbagai metode dan cara telah dilakukan dalam upaya mewujudkan substansi demokrasi yang berbasis pada kekuatan tertinggi dari nilai-nilai demokrasi yaitu kedaulatan rakyat, namun selama ini realitas yang menggambarkan bahwa belum terdapat sebuah sistem yang secara sempurna dapat mewujudkan konstruksi ideal bagi terwujudnya sistem demokrasi yang relatif betul-betul sempurna sebagaimana yang jadi harapan pembentukan sebuah sistem kebangsaan.

Suatu sistem negara demokrasi terdapat adanya sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan dan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintah negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Tahun 1945. Menurut UU No. 7 Tahun 2017 Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung yaitu umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggaraan pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Kemudian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan bahwa calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur, Bupati dan Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya.

Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) merupakan salah satu bentuk kegiatan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, dimana pemilihan umum kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, sosialisasi mengenai pemilukada tentu saja dibutuhkan guna memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pemilukada itu sendiri.

Sosialisasi berfungsi untuk mengembangkan serta memperkuat sikap dimasyarakat. Sosialisasi melibatkan keluarga, sekolah dan lembaga-lembaga tertentu yang ada dimasyarakat. Dalam menjalankan kegiatan sosialisasi pemilih, Komisi Pemilihan Umum berpedoman pada PKPURI No. 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan pemilih dan Partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota. Didalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa sosialisasi pemilu adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program dalam penyelenggaraan pemilihan. Fungsi dari sosialisasi Kebijakan itu sendiri antara lain untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan

secara demokrasi serta mendorong timbulnya partisipasi kedalam kehidupan demokrasi. Hal ini senada dengan konsep demokrasi yang telah dijelaskan dimana rakyat harus berpartisipasi dalam kehidupan Sehari-hari.

Selama pesta demokrasi berlangsung khususnya pemilukada yang diharapkan menjadi sarana partisipasi politik masyarakat daerah dengan mengedepankan demokrasi sebagai ujung tombak pemerintahan suatu Negara. Ternyata kita dihadapkan pada suatu titik dimana masyarakat blom siap seutuhnya dalam melaksanakan pesta demokrasi ini, sehingga pemahaman politik hanya sebatas memberi suara tanpa tahu apa *essensi* dari demokrasi itu sendiri, akibatnya pemilu hanya sebatas rutinitas berkala yang semakin ditinggalkan. Hal ini menyebabkan dalam setiap pelaksanaannya angka golput menjadi kandidat kuat pemenang dalam pemilukada. Di Provinsi Jawa Barat sendiri selama pelaksanaan pemilukada angka golput selalu menjadi pemenang bahkan yang terbaru pada pemilukada Walikota Bandung angka golput hampir dua kali pada tahun 2008-2013 dari pemenang pemilukada.

KPU RI sendiri telah menargetkan partisipasi pemilih pada pemilihan serentak sebesar 75 persen. Target serupapun juga dicenangkan oleh KPUD Jawa Barat dan KPUD Kota Bandung. Target ini dirasa sangat penting untuk memacu motivasi agar partisipasi pemilih di Kota Bandung ini meningkat dari sebelumnya. Sudah berbagai upaya yang telah dilakukan oleh KPUD Kota Bandung sendiri untuk meningkatkan partisipasi pimilih dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung yang menjadi permasalahan utama yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilukada, hal ini dapat dilihat dari hasil pemilihan antara

tahun 2008, tahun 2013 dan tahun 2018. Pada pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Bandung pada tahun 2008 partisipasi masyarakat itu mencapai 69,49%, sedangkan pada tahun 2013 partisipasi masyarakat menurun menjadi 60,32%, dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 76,62% hal ini dapat dibuktikan dengan adanya data sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Bandung dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung

NO	URAIAN	Jumlah/Tahun 2008	Jumlah/Tahun 2013	Jumlah/Tahun 2018
1	Data pemilih dalam Daftar Tetap (DPT)	1,521,362 Jiwa	1,657,406 Jiwa	1,697,595 Jiwa
2	Data pemilih tetap tambahan/pengguna KTP/identitas lainnya	6,873 Jiwa	5,781 Jiwa	6,746 Jiwa
	Jumlah	1,528,235 Jiwa	1,663,187 Jiwa	1,704,341 Jiwa
3	Pengguna Hak Pilih	1,061,934 Jiwa	1,003,187 Jiwa	1,305,872 Jiwa
4	Prosentase Tingkat Partisipasi Masyarakat	69,49%	60,32%	76,62%

Sumber: Data Diolah Dari KPU Kota Bandung 2008-2018

Dilihat dari data diatas menjelaskan bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang tadinya 69,49%, Menurun menjadi 60,32% dan meningkat kembali menjadi 76,62% telah terbukti bahwa jumlah partisipasi masyarakat yang pada tahun 2008 ke 2013 menurun 9,71% dan meningkat kembali di tahun 2018 16,30% dan ini menjadi angka hasil peningkatan maupun penurunan di tahun yang berbeda.

Berdasarkan Permasalahan diatas Penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian ini yang berjudul : **“Pengaruh Sosialisasi Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Walikota Bandung (STUDI Sosialisasi Kebijakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum NO 8 TAHUN 2017)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Walikota Bandung Tahun 2008 ke Tahun 2018
2. Menurunnya angka prosentase Partisipasi masyarakat dalam Pilkada Walikota Bandung Tahun 2008 ke Tahun 2013
3. Kurangnya sosialisasi kebijakan yang dilakukan oleh KPUD Kota Bandung pada Tahun 2013
4. Meningkatnya kembali jumlah angka prosentase 2013 ke Tahun 2018 mencapai 16,30%

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan demikian, rumusan masalah yang akan peneliti ungkapkan dalam Latar Belakang masalah diatas adalah ;

1. Seberapa Besar Pengaruh Imitasi Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Walikota Bandung ?
2. Seberapa Besar Pengaruh Intruksi Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Walikota Bandung ?
3. Seberapa Besar Pengaruh Motivasi Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Walikota Bandung ?

4. Seberapa Besar Pengaruh Imitasi, Instruksi, Motivasi secara Simultan Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Walikota Kota Bandung ?

1.4. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui Seberapa Besar Pengaruh Imitasi Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Walikota Bandung!
2. Untuk mengetahui Seberapa Besar Pengaruh Intruksi Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Walikota Bandung!
3. Untuk Mengetahui Seberapa Besar Pengaruh Motivasi Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Walikota Bandung!
4. Untuk Mengetahui Seberapa Besar Pengaruh Imitasi, Instruksi, Motivasi secara Simultan Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Walikota Kota Bandung!

1.5. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, dan msungkin seperti berikut ini penulis menuangkan manfaat berikut :

1.5.1. Secara Teoritis

- a. Untuk penulis, pada dasarnya untuk mengembangkan teori-teori akademis dalam rangka memberikan kontribusi pemikiran dari segi efek keilmuan dan secara akademis dalam pengembangan konsep serta teori kebijakan publik khususnya terkait pemilihan umum.

- b. Untuk lembaga, dapat mengungkapkan suatu produk pengembangan keilmuan melalui teori yang ada dengan pendekatan dan metode lagi.

1.5.2. Secara Praktis

- a. Untuk penulis, agar dapat lebih meningkatkan kembali kemampuan penulis dalam membuat suatu karya tulis ilmiah.
- b. Untuk lembaga, sebagai bahan pustaka bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian yang sama, sehingga dapat mencari alternative pemecahan masalah dengan masalah yang sama.

1.6. Kerangka Pemikiran

Menurut Siagian (2004) yang dikutip oleh , administrasi sebagai suatu proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. (Pasolong 2013:2-3).

Menurut Nicholas Henry (1988) dalam (Pasolong 2013:8), mengemukakan administrasi publik merupakan suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, pemerintah juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

Sosialisasi merupakan salah satu bentuk aspek penting demokrasi, partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilihan umum, baik itu aktif maupun pasif dan bersifat langsung maupun tidak langsung guna mempengaruhi kebijakan pemerintah. Menurut (Peter 2003:39) dalam bukunya yang berjudul “Sosialisasi dalam kebijakan pemerintah” mengemukakan pendapatnya mengenai Sosialisasi

sebagai berikut. “Sosialisasi adalah suatu proses dimana seorang anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat”.

Para agen mentransmisikan elemen-elemen sosialisasi sangat beragam. Menurut Rush and Althoff (1997) dalam (Handoyo 2013:215) ada beberapa mekanisme sosialisasi kedalam dimensi sosialisasi berikut ini diantaranya :

1. Imitasi
2. Instruksi
3. Motivasi

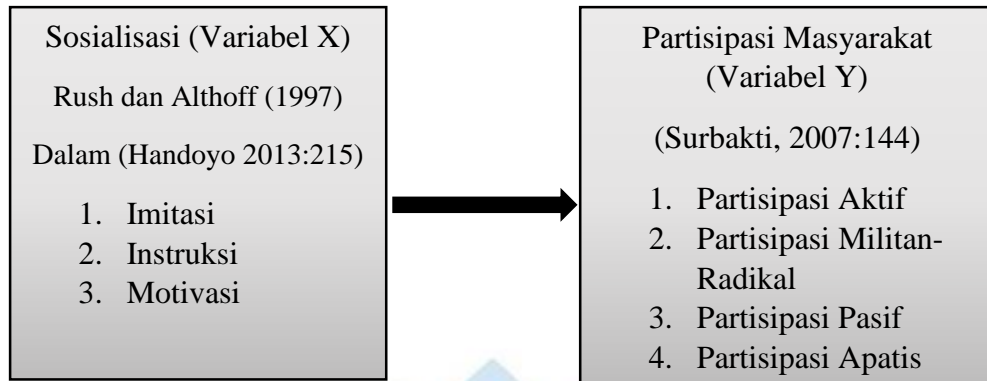
Partisipasi masyarakat menurut (Adi 2007:27) merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masalah dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Peran partisipasi masyarakat menurut (Surbakti 2007:144), membedakan tipe partisipasi masyarakat kedalam empat macam, sebagai berikut :

1. Partisipasi Aktif
2. Partisipasi Militan-Radikal
3. Partisipasi Pasif
4. Partisipasi Apatis

Gambar 1.1

Model Kerangka Pemikiran



1.7. Hipotesis

Berdasarkan pandangan dari (Sugiyono 2017:64), analisis hipotesis adalah sebuah balasan sementara terhadap rumusan masalah peneliti, dimana rumusan masalah ini telah dinyatakan dalam berbagai bentuk pertanyaan kalimat. Dinyatakan sementara karena jawaban yang memberikan hanya berdasarkan keadaan pengalaman yang diperoleh melalui hasil pengumpulan data.

Bentuk hipotesis yang akan penulis ajukan dalam penelitian ini adalah hipotesis asosiatif. Menurut (Sugiyono 2017:77) hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menyatakan hubungan anatar dua variabel atau lebih.

1. **a. Ho** : Pengaruh Imitasi Terhadap Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Walikota Kota Bandung tidak terdapat pengaruh yang signifikan.
- b. H1** : Pengaruh Imitasi Terhadap Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Walikota Kota Bandung terdapat pengaruh yang signifikan.

2. **a. Ho** : Pengaruh Intruksi Terhadap Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Walikota Kota Bandung tidak terdapat pengaruh yang signifikan.
b. H1 : Pengaruh Intruksi Terhadap Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Walikota Kota Bandung terdapat pengaruh yang signifikan.
3. **a. Ho** : Pengaruh Motivasi Terhadap Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Walikota Kota Bandung tidak terdapat pengaruh yang signifikan.
b. H1 : Pengaruh Motivasi Terhadap Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Walikota Kota Bandung terdapat pengaruh yang signifikan.
4. **a. Ho** : Pengaruh Imitasi, Instruksi, Motivasi Terhadap Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Walikota Kota Bandung tidak terdapat pengaruh yang signifikan.
b. H1 : Pengaruh Imitasi, Instruksi, Motivasi Terhadap Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Walikota Kota Bandung terdapat pengaruh yang signifikan.